



**EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK DALAM
PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERKOTAAN DI KELURAHAN MEKAR JAYA
DEPOK**

Raymundus I Wayan Ray, Murwat Surtyani

Prodi Administrasi Publik,
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
raymondray1506@gmail.com

Abstract, The purpose of this research is to find out; 1) Does the evaluation of public policies have an influence on the implementation of the national program of urban independent community empowerment in Mekarjaya Village, Depok City 16411. 2) How much influence does the evaluation of public policies have on the implementation of the national program of urban independent community empowerment in Mekarjaya Village, Depok City 16411. The research method used is quantitative research. The results of the validity and reliability test show that the results obtained are greater than the specified value (validity 0.30 and reliability 0.60), so it can be said that the data is valid and the instrument is reliable. From simple regression analysis, it is known that the value of R. Squere is 13.40%, this shows that the effect of the implementation of the national urban community empowerment program is determined by the independent variable, namely the evaluation of public policies, while the rest is influenced by other factors not observed in this study. After conducting the research, it can be concluded that the evaluation of public policies has an impact on the implementation of the national program for empowering urban independent communities in Mekarjaya Village, Depok City 16411

Keywords: Public Policy Evaluation, Implementation of the National Urban Community Empowerment Program

Abstrak, Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) Apakah evaluasi kebijakan publik memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411. 2) Seberapa besar pengaruh evaluasi kebijakan publik terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Hasil uji Validitas dan Reliabilitas diketahui bahwa hasil yang didapat lebih besar dari nilai yang ditentukan (Validitas 0,30 dan Reliabilitas 0,60) maka dapat dikatakan datanya valid dan instrumennya reliabel. Dari analisis regresi sederhana diketahui nilai R.Square sebesar 13,40 %, hal ini menunjukkan bahwa pengaruh pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan ditentukan oleh variabel bebas yaitu evaluasi kebijakan publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Setelah melakukan penelitian maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa evaluasi kebijakan publik berpengaruh terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kota Depok 16411

Kata kunci : Evaluasi Kebijakan Publik, Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

PENDAHULUAN

Hakekat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seluruhnya, tetapi dalam kenyataannya masih adanya kesenjangan sosial yang belum dapat dipecahkan. Salah satu bentuk masalah sosial yang saat ini masih mengemuka dibanyak negara sedang berkembang termasuk Indonesia adalah permasalahan kemiskinan. Secara umum kemiskinan ialah satu keadaan dimana seseorang itu kekurangan bahan-bahan keperluan hidup. Dalam masyarakat modern, kemiskinan biasanya diartikan dengan masalah kekurangan uang. Di Indonesia, walaupun usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sudah dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan nasional, dan didalamnya juga terdapat program pengentasan kemiskinan, akan tetapi jumlah penduduk yang masuk kategori miskin masih cukup besar. Di Indonesia masalah kemiskinan dirasakan sudah sangat mendesak untuk ditangani, khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan. Pemberdayaan masyarakat

pada dasarnya merupakan proses untuk membuat masyarakat menjadi berdaya. Setiap anggota masyarakat dalam sebuah komunitas sebenarnya memiliki potensi, gagasan serta kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik, namun potensi itu terkadang tidak bisa berkembang disebabkan faktor-faktor tertentu.

Untuk menggerakkan kembali kemandirian masyarakat dalam pembangunan dikomunitasnya, maka diperlukan dorongan-dorongan atau gagasan awal untuk menyadarkan kembali peran dan posisinya dalam kerangka untuk membangun masyarakat madani. Proses penyadaran masyarakat tersebut dilakukan melalui konsep-konsep pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas masyarakat adalah bentuk dari upaya pengembangan pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat agar dapat berperan serta aktif dalam menjalankan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan (Sumaryadi, 2015: 135). Pengembangan kapasitas masyarakat pada hakikatnya merupakan usaha meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri, sehingga kegiatan tersebut seharusnya mendapat dukungan dan peran serta aktif dari masyarakat itu sendiri. Apabila masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan belum memahami secara betul makna dari pengembangan kapasitas itu sendiri dan tidak memberikan tanggapan secara positif terhadap upaya-upaya pengembangan kapasitas yang dilaksanakan maka bisa dipastikan upaya tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil sesuai tujuan yang ingin dicapai.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan) adalah kelanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat (Departemen Pekerjaan Umum, 2008). Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat

menuju kemandiriannya, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses sosialisasi, pelatihan dan pelaksanaan siklus pemberdayaan.

Dalam implementasinya ketiga kegiatan tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan peran serta masyarakat dapat menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Dalam kondisi yang ideal proses pengembangan kapasitas masyarakat harus dijalankan dengan menyesuaikan kemampuan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga bisa jadi proses tersebut memerlukan waktu dan pendekatan yang berbeda-beda antar satu komunitas dengan komunitas lainnya. Untuk memberikan pemahaman dan mengajak masyarakat dalam partisipasi demi kemajuan mereka sendiri juga tidak bisa disamaratakan antara satu anggota masyarakat dengan anggota masyarakat yang lain, hal ini disebabkan karena latar belakang pemikiran yang beragam yang dipengaruhi oleh status sosial, jenis kelamin, usia, pekerjaan dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu derajat keberdayaan masyarakat akan sangat bervariasi meskipun proses pengembangan kapasitas yang ada dilakukan dengan pendekatan yang sama dan dalam waktu yang bersamaan. Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411 diperlukan sebuah wadah perjuangan untuk penanggulangan kemiskinan dan kepemimpinan kolektif yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan agar mampu mengendalikan gerakan bersama yaitu Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) sebagai lembaga kemasyarakatan yang sudah ada sesuai dengan prinsip dan nilai yang diusung Proram Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (Bahan Bacaan Tim Pengendali Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri).

BKM sendiri mempunyai misi yaitu membangun kapital sosial dengan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan, ikatan-ikatan sosial dan menggalang solidaritas sosial sesama warga agar saling bekerjasama demi kebaikan, kepentingan dan kebutuhan bersama yang pada gilirannya diharapkan memperkuat kemandirian masyarakat untuk menuju tatanan masyarakat madani. Dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411 BKM tidak sendiri tetapi dibantu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat yang dibentuk disetiap RW yang

ada di Lingkungan Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411. Dimana KSM sendiri bertugas menyampaikan usulan dari masyarakat kepada BKM mengenai apa saja yang menyangkut PNPM-MP. Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan pada PNPM Mandiri perkotaan di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411 yaitu pengembangan infrastruktur dan sosial wilayah. Dimana kegiatan social yang telah dilaksanakan seperti pelatihan yang sifatnya pemberdayaan yaitu pelatihan komputer, sedangkan pengembangan infrastruktur yang telah dilaksanakan yaitu Saluran Drainase pengaspalan jalan dan Pembuatan Posyandu. Namun selama pelaksanaan kegiatan PNPM-MP di Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411 masih terdapat kendala- kendala seperti kendala utamanya yaitu berasal dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat masih tidak peduli terhadap lingkungannya, hal ini diketahui dari kegiatan atau aktivitas masyarakat yang kurang memiliki kesadaran berpartisipasi dalam pembangunan sehingga dapat menghambat proses pembangunan kota yang telah direncanakan.

Disamping itu, anggaran yang diberikan oleh pemerintah terbatas atau stimulan dana, artinya biaya tidak seratus persen dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah pada setiap tahunnya selalu tetap tidak ada penambahan, yaitu pada tahun 2018 dan 2020 jumlah anggaran yang diberikan oleh pemerintah sama sebesar 150 juta yang berasal dari APBN sebanyak 80% dan APBD 20%. Organisasi Masyarakat Warga sebagai implementasi dari buah proses pengkajian PNPM Mandiri Perkotaan dalam membangun model kelembagaan yang bersifat pemberi pelayanan (*service provider*) justru belum sepenuhnya mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga keberadaannya belum mampu menjawab persoalan masyarakat khususnya dalam menanggulangi kemiskinan ditengah masyarakat yang memilih mereka.

Fasilitator yang ada belum sepenuhnya berupaya melakukan proses penyadaran kritis menuju sebuah tatanan masyarakat madani. Karena sebagai pelaksana proyek, seharusnya kita adalah pekerja. Hakekat sebuah pekerjaan adalah sebuah mahakarya yang sejati dan luhur. Pekerjaan harus mampu memberikan kebahagiaan bagi si peminat pekerjaan. Pekerjaan yang sebaliknya, kesengsaraan dan penderitaan bagi orang lain, sebenarnya bukanlah hakekat sebuah sejatinya kerja. *Stakeholder* sering mengalami kebimbangan pada pekerjaan yang memberikan sebuah kemalangan. Sadar atau tidak,

telah menghilangkan jejak. Jejak itu adalah kemanusiaan, Ketuhanan, dan ego itu sendiri. Mengupasnya perlu debat panjang dan memerlukan banyak pisau analisis yang bermuara pada idealisme.

KAJIAN TEORITIS

Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis

Evaluasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya atau *resources*, yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumberdaya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Pemilahan kedua dari tujuan kebijakan adalah regulatif versus deregulatif. Kebijakan regulatif bersifat mengatur dan membatasi, sedangkan kebijakan deregulatif membebaskan. Evaluasi kebijakan dikatakan sebagai suatu harapan dan kenyataan dan sebagai proses kebijakan publik karena : Sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut “Evaluasi kebijakan” Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara “harapan” dengan “kenyataan” Menurut Dunn (2006:608), bahwa ada 3 fungsi evaluasi, yaitu:

1. Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Dalam hal ini, evaluasi mengungkapkan seberapa jauh tujuan, tujuan tertentu dan target tertentu telah dicapai,
2. Evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai diperjelas dengan mengidentifikasi dan mengoprasikan tujuan dan target. Nilai juga dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan target dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai (kelompok kepentingan, pegawai negeri, kelompok-kelompok klien), maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas (teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif),

3. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Informasi tentang tidak memadainya kinerja kebijakan dapat memberi sumbangan pada perumusan ulang masalah kebijakan, sebagai contoh dengan menunjukkan bahwa tujuan dan target perlu didefinisi ulang.

Evaluasi dapat pula menyumbang pada definisi alternatif kebijakan yang baru atau revisi kebijakan dengan menunjukkan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain. Bisa dikatakan bahwa Evaluasi merupakan cara untuk membuktikan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program, oleh karena itu pengertian evaluasi sering digunakan untuk menunjukan tahapan siklus pengelolaan program yang mencakup :

- a. Evaluasi pada tahap perencanaan (EXANTE). Pada tahap perencanaan, evaluasi sering digunakan untuk memilih dan menentukan prioritas dari berbagai alternative dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- b. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (ONGOING). Pada tahap pelaksanaan, evaluasi digunakan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan program dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.
- c. Evaluasi pada tahap Pasca Pelaksanaan (EX-POST) pada tahap pasca pelaksanaan evaluasi ini diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini dilakukan setelah program berakhir untuk menilai relevansi (dampak dibandingkan masukan), efektivitas (hasil dibandingkan keluaran), kemanfaatan (dampak dibandingkan hasil), dan keberlanjutan (dampak dibandingkan dengan hasil dan keluaran) dari suatu program. Namun dalam perkembangan Ilmu Kebijakan publik, yang sangat populer sebuah model yang dikembangkan oleh William Dunn.

Adapun kriteria ± kriteria evaluasi kebijakan yang Dunn (1999:610) gambarkan sebagai berikut :

1. hasil yang diinginkan memecahkan masalah ?
2. Perataan, apakah biaya manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok kelompok yang berbeda ?

4. Responsivitas, Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok ± kelompok tertentu ?
5. Ketepatan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar ± benar berguna atau bernilai ?

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil. Beberapa keberhasilan PPK adalah berupa penyediaan lapangan kerja dan pendapatan bagi kelompok rakyat miskin, efisiensi dan efektivitas kegiatan, serta berhasil menumbuhkan kebersamaan dan partisipasi masyarakat. Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan. Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan, strategi yang dikembangkan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Perdesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Sedangkan Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan

penerapan. Majone dan Wildavsky (2018) mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah : Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2015: 9) mengemukakan definisi program sebagai, “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.” Lebih lengkap lagi, Hasibuan (2017: 72) juga mengungkapkan bahwa program adalah, suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan. Selain itu, definisi program juga termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa : Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi masyarakat. Dalam proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila ditinjau dari wujud hasil yang dicapai atau outcomes. Karena dalam proses tersebut turut bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat mendukung maupun menghambat pencapaian sasaran suatu program

PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program- program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan /meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Tujuan PNPM Mandiri

1. Tujuan Umum

Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. Tujuan Khusus

- 1) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif, dan akuntabel.
- 3) Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
- 4) Meningkatkan sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya, untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- 5) Meningkatkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- 6) Meningkatkan modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

Strategi PNPM Mandiri

Strategi PNPM Mandiri terdiri atas:

1) Strategi Dasar

- a) Mengintensifkan upaya-upaya pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat.
- b) Menjalin kemitraan yang seluas-luasnya dengan berbagai pihak untuk bersamasama mewujudkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat.
- c) Menerapkan keterpaduan dan sinergi pendekatan pembangunan sektoral, pembangunan kewilayahan, dan pembangunan partisipatif.

2) Strategi Operasional

- a) Mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki masyarakat, pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya secara sinergis.
- b) Memperkuat peran pemerintah kota/kabupaten sebagai pengelola program-program penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.
- c) Mengembangkan kelembagaan masyarakat yang dipercaya, mengakar, dan akuntabel.
- d) Mengoptimalkan peran sektor dalam pelayanan dan kegiatan pembangunan secara terpadu di tingkat komunitas.
- e) Meningkatkan kemampuan pembelajaran di masyarakat dalam memahami kebutuhan dan potensinya serta memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya.
- f) Menerapkan konsep pembangunan partisipatif secara konsisten dan dinamis serta berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Subyek penelitian adalah seluruh anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BKM Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411 yang menjadi pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini, untuk memperoleh gambaran atas materi yang dijadikan objek penelitian. Responden diberikan informasi melalui email untuk dapat berkontribusi pada penelitian ini dengan melakukan pengisian kuisisioner secara online. Analisis data menggunakan software SPSS dengan melakukan uji pengaruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jumlah responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 71 responden. 41 responden (57,75 %) mengidentifikasi diri sebagai pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri yang dilibatkan secara langsung dalam kegiatan penelitian ini dan 30 responden (42,25 %) mengidentifikasi diri sebagai non pelaksana program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. 45 responden (63,38 % berjenis kelamin pria dan 26 responden (36,62% berjenis kelamin wanita. 40

responden (57,75% berlatar belakang pendidikan social dan 31 responden (42,25%) berlatar belakang pendidikan non social.

Tabel 1 : Profil Responden Berdasarkan Profesi

No.	Jenis Responden	Jumlah	Presentase (%)	Keterangan
1.	Responden Pelaksana PNPM Mandiri	41	57,75	
2.	Responden Non Pelaksana PNPM Mandiri	30	42,25	
Total		71	100	

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Tabel 2 : Profil Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin Responden	Jumlah	Presentase (%)	Keterangan
1.	Pria	45	63,38	
2.	Wanita	26	36,62	
Total		71	100	

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Tabel 3 : Profil Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

No.	Latar Belakang Pendidikan	Jumlah	Presentase (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Sosial	40	56,33	
2.	Non Pendidikan Sosial	31	43,67	
Total		71	100	

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Hasil Uji Validitas

Tabel 1 merupakan uji validitas dari keseluruhan responden penelitian. Nilai batas minimum yang digunakan untuk melihat apakah suatu instrument valid atau tidak sebesar 0,30.

Tabel 4 : Hasil Uji Validitas Kuisisioner Evaluasi Kebijakan Publik

Variabel	Nilai hasil	Kesimpulan
X 1	0,363	Valid
X2	0,421	Valid
X 3	0,380	Valid
X4	0,365	Valid
X5	0,419	Valid

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Dari kelima pernyataan dalam variabel Evaluasi Kebijakan Publik (X) bahwa kelima butir pernyataan memiliki nilai hasil lebih dari nilai 0,30. Maka dapat dikatakan pernyataan diatas adalah semuanya valid.

Tabel 5 : Hasil Uji Validitas Kuisisioner Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Variabel	Nilai hasil	Kesimpul
----------	-------------	----------

		an
Y. 1	0,387	Valid
Y. 2	0,566	Valid
Y. 3	0,361	Valid
Y. 4	0,651	Valid
Y.5	0,431	Valid

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Dari kelima pernyataan dalam variable Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y) bahwa kelima butir pernyataan memiliki nilai hasil lebih dari nilai 0,30. Maka dapat dikatakan pernyataan diatas adalah valid. Untuk uji Validitas, hasil menunjukkan bahwa seluruh variabel yang diteliti menghasilkan nilai korelasi antara 0,363 sampai dengan 0,421 untuk variabel Evaluasi Kebijakan Publik, dan untuk variabel Pelaksanaan PNPM Mandiri menghasilkan nilai korelasi antara 0,361 sampai dengan 0,651. Artinya instrumen dinyatakan valid karena dari kesemua hasil nilai lebih dari nilai 0,30 yang ditetapkan reliabilitas ini menggunakan *Cronbach's Alpha* sebagai acuan untuk melihat reliabel atau tidak suatu indicator. Tolak ukur nilai *Cronbach's Alpha* yang digunakan adalah lebih dari atau sama dengan 0,60. Semua indicator dinyatakan reliabel karena > 0,60.

Hasil Uji Reliabilitas

Tabel 6 : Hasil Uji Reliabilitas Kuisisioner Seluruh Variabel X dan Y

Keterangan	Butir Pernyataan	Yang Dipertahankan	Alpha
Evaluasi Kebijakan Publik (X)	5	5	0,634
Mandiri (Y)	5	5	0,712

Sumber : Data Primer Olahan 2020

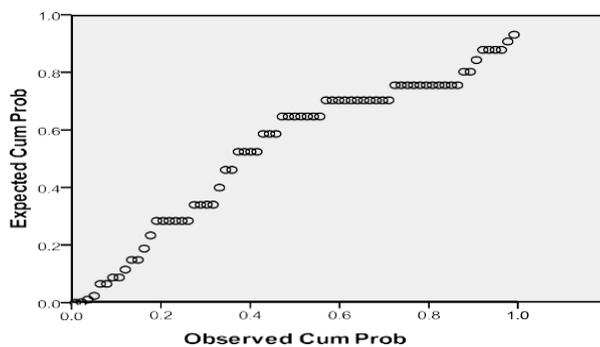
Pada variabel Evaluasi Kebijakan Publik (X) nilai alpha sebesar 0,634 > 0,60 dan pada variabel Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y) nilai alpha sebesar 0,712 > 0,60. Ini berarti setiap butir pernyataan untuk mengukur kedua variabel adalah reliabel. Untuk uji reliabilitas, hasil dari keseluruhan variabel dapat diketahui untuk variabel Evaluasi Kebijakan Publik nilai alpha sebesar 0,634, sedangkan untuk variabel Pelaksanaan PNPM Mandiri nilai alpha sebesar 0,712. Artinya instrumen yang dipakai reliabel karena lebih besar dari nilai yang ditetapkan yaitu 0,6 atau 0,60

Uji Normalitas Data.

Alat dagnosis yang digunakan peneliti dalam pengujian normalitas data adalah *normal probability plot*. Tujuannya menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependennya maupun independen memiliki distribusi normal maupun mendekati normal

Gambar 1 : P- P Plot Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable Pelaksanaan PNPM Mandiri



Sumber : Data Primer Olahan 2020

Pengujian dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik normal probilitas plot, dasar pengambilan keputusan adalah data menyebar di sekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Dari gambar di atas dapat diketahui adanya hubungan antara variabel X dan Y dimana model regresi asumsi normalitas penyebaran datanya rata-rata memenuhi disekitar garis diagonal.

Analisis Regresi Sederhana

Untuk mencari hubungan antara variabel bebas yaitu Evaluasi Kebijakan Publik (X) terhadap variabel terikat yaitu Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y). Dipakai teknik analisis data Regresi Linear Sederhana.

Tabel 7 : Koefisien Regresi Tentang Pengaruh Evaluasi Kebijakan Publik (X) Terhadap Pelaksanaan PNPM mandiri (Y)

Variabel	Beta	Standar Error	T	sig
Evaluasi Kebijakan Publik (X)	0,333	0,102	3,271	0,002
Constanta (a)	3,174	0,456	6,964	0,000
Adjstf. R Square = 0,122 R. Square = 0,134				

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Berdasarkan Tabel 7 di atas, maka diperoleh model persamaan regresi linear sederhana berikut : $Y = 3,174 + 0,333X$. Dari perhitungan diatas fungsi regresi linier sederhana, yang berarti jika setiap kenaikan/penurunan variabel Evaluasi Kebijakan Publik (X) maka akan diikuti dengan kenaikan/penurunan Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y). Pengaruh evaluasi kebijakan publik, dimana variabel ini diperoleh nilai bX sebesar 0,333 yang artinya setiap terjadi peningkatan pada evaluasi kebijakan publik sebesar 1%, maka dapat menambah peningkatan pada pelaksanaan PNPM Mandiri sebesar 0,333.

Analisis Koefisien Determinasi (R^2) / R Square

Tabel 8: Koefesien Determinasi Pengaruh Evaluasi Kebijakan Publik (X) Terhadap Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.366 ^a	.134	.122	.423	1.187

a. Predictors: (Constant), Evaluasi Kebijakan Publik

b. Dependent Variable: Pelaksanaan PNPM Mandiri

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Uji Koefisien Determinasi (R^2)/Square digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Berdasarkan tabel regresi sederhana dapat diketahui nilai koefisien determinasi sebesar 0,1340 atau sebesar 13,40 %. Hal ini menunjukkan bahwa Evaluasi Kebijakan Publik (X) mampu menjelaskan dan memberikan sumbangan terhadap variabel terikat sebesar 13,40 %. Sedangkan sisanya sebesar 86,6% diterangkan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Uji t

Uji t dipakai untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual serta mengetahui variabel terikat dengan mengukur derajat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam menentukan diterima atau ditolaknya

hipotesis, maka harus dicari dari nilai t_{tabel} dengan menentukan *degree of freedom* (df) adalah: $\text{degree of freedom (df)} = n-2 = 71-2 = 69$ maka, $t_{\text{tabel}} = 1,669$. Berdasarkan perhitungan SPSS, maka dapat diketahui hasil analisis koefisien regresi seperti tabel di bawah ini :

Tabel 9 : Koefisien Regresi Variabel bebas Secara Parsial Terhadap Variabel Terikat

Variabel	Beta	t_{hitung}	t_{tabel}	Sig
Evaluasi Kebijakan Publik (X)	0,333	3,271	1,669	0,002

Sumber : Data Primer Olahan 2020

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas dan hasil pengujian secara parsial , maka diperoleh nilai t_{hitung} 3,271 dan nilai t_{tabel} 1,669. Karena $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka dengan demikian terdapat pengaruh Evaluasi Kebijakan Publik (X) terhadap Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y) pada Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan dari penelitian tentang pengaruh Evaluasi kebijakan publik (X) terhadap Pelaksanaan PNPM Mandiri (Y) maka, dapat disimpulkan sebagai berikut; Pertama, berdasarkan hasil perhitungan persamaan regresi linear sederhana diperoleh nilai $Y = 3,174 + 0,333X$, Yang artinya Setiap peningkatan Evaluasi Kebijakan Publik sebesar 1, maka dapat menambah peningkatan Pelaksanaan PNPM Mandiri sebesar 0,333.

Kedua, dari perhitungan koefisien determinasi diperoleh nilai r^2 sebesar 0,134, hal ini menunjukkan bahwa 13,4 % perubahan pada Pelaksanaan PNPM Mandiri ditentukan oleh variabel bebas yakni faktor Evaluasi Kebijakan Publik, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini. Ketiga, hasil penelitian pada penelitian ini diperoleh $t_{\text{hitung}} = 3,271$ sedangkan $t_{\text{tabel}} = 1,669$. Hal ini menunjukkan bahwa $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$. Dapat disimpulkan bahwa Evaluasi Kebijakan Publik berpengaruh signifikan terhadap Pelaksanaan PNPM Mandiri pada Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok 16411.

Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah pertama, evaluasi Kebijakan Publik hendaknya dilakukan dengan efektif, dan secara berkesinambungan pada setiap pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah Pusat maupun

pemerintah daerah. Kedua, Pemerintah sebaiknya harus selalu mengadakan evaluasi secara rutin terhadap pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri dan terus mengadakan perbaikan sehingga mampu menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas. Terakhir, setiap ada pelaksanaan program nasional sebaiknya dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah perlu kiranya mengadakan evaluasi supaya masyarakat umum mengetahui hasil akhir dari pelaksanaan program tersebut apakah berhasil sesuai dengan perencanaan awal atau gagal.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, William N, 2006. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2017, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta.
- Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2015). *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Majone dan Wildavsky, 2018. *Implementasi sebagai penilaian : Study Implementasi* (Online) 2 halaman (<http://www.laporanpenelitian.cc.co.html>)

Dokumen

- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,

Sumber Lain :

- Apriyanti, Liyana. 2011. *Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Kasus Implementasi Program Pinjaman Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Kemijen Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Tahun 2008-2010)*. http://eprints.undip.ac.id/27918/1/SKRIPSI_FULL_TEXT.pdf. (29 Juni 2015)

Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2011): Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri – Perkotaan 2011 Khusus Provinsi DKI Jakarta.

Permana, E. (2010). Evaluasi Program PNPM Mandiri Perkotaan (Studi Kasus di LKM Bina Budi Mulya dan LKM Ratujaya Kecamatan Pancoranmas Depok), Tesis, tidak dipublikasikan, Fakultas Ekonomi, Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.

Petunjuk Teknis. 2013. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. Kemendagri. Jakarta. Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2009-2014. Kementerian Bappenas. Jakarta

